

**ISLAM DAN NEGARA: STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN MUNAWIR
SJADZALI**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam

Oleh :

Syamsul Huda
NIM. 09520032

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka menurut kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syamsul Huda

NIM : 09520032

Judul : Islam Dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir Dan Munawir Sjadzali

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan/Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2016
Pembimbing

Dr. Roma Ulinnuha M.Hum
NIP. 19740904 200604 100 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl.Marsda Adisucipto Telp. (0274)512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor:B-1790/Un.D2/DU/PP.05.3/08/2016

Tugas Akhir dengan judul

: ISLAM DAN NEGARA: STUDI KOMPARASI
PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR DAN
MUNAWIR SJADZALI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

:
SYAMSUL HUDA
: 09520032
: Selasa 28 Juni 2016
: A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr.Roma Ulinnuha, M.Hum.
NIP.19740904 200604 1 002

Penguji II

Ahmad Salehudin, S.Th.I.,M.A.
NIP.19780405 200901 1 010

Penguji III

H. Ahmad Muttaqin,S.Ag.,M.Ag.,M.A.,Ph.D.
NIP.19720414 199903 1 002

Yogyakarta, 22 Agustus 2016



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Huda
NIM : 09520032
Jurusan : Perbandingan Agama (PA)
Fakultas : Ushuludin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta 22 Juni 2016



MOTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini di karenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah

Thomas Alva Edison

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua
- ❖ Orang-orang yang selalu memberikusemangat dan motivasi sehingga kubisa menyelesaikan masalah dalam hidupku.
- ❖ Almamater Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah yang telah memberikan hidayah, taufiq dan inayah-Nya, sehingga kami masih bisa bersyukur atas segala karunia dan rahmatnya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Saw, keluarga, serta para sahabatnya.

Penulis menyadari kekurangan yang dimiliki, bahkan jauh dari yang sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka kritik dan saran agar menjadikan skripsi ini lebih baik. Tidak lupa, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penulisan ini takkan pernah terwujud tanpa adanya bantuan, inspirasi, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ahmad MuttaqinS.Ag. M.Ag. MA PhD. sebagai Ketua Program Studi Perbandingan Agama, yang memberikan inspirasi dan dorongannya.
3. Bapak Dr. Roma UlinnuhaM.Hum. sebagai Pembimbing skripsi, terimakasih atas kritik dan saran serta luangan waktunya.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SunanKalijaga Yogyakarta, terimakasih atas pelayanan yang *Panjenengan Sedoyo* berikan.

5. Ibu dan Bapakku karena kasih dan cintamu selalu hadir. Untuk kakaku purwanto, Adik-adikku SitiMukholifah, Ia Naturrofiah, Siti Aisyah, keberadaan kalian memberikan semangat dan harapan untuk terus maju.
6. Amalia Putri Utami keberadaanmu yang mengusir lelahku.
7. Teman-teman dikosgriyahana (Baul,Rozi, Gembel,Rudal,Saprol,Kiwil,dll) saya banyak belajar dari kalian, terimakasih untuk segala moment kebersamaanya.
8. Sahabat Ahmad Davit, Alung Arton, Yoyot Supiana, Pendi Anam, Najib, Maftuh kalian adalah sahabat sekaligus keluarga kecilku. Pertemuan kita di Jogja semoga menjadi bagian dari sejarah penting kelak.
9. Sahabat Korp Pembebasan, Sahabat-sahabat di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam Komisariat UIN Sunan Kalijaga Cabang D.I Yogyakarta kita berproses bersama di Jogja hingga kelak cita-cita diantara kita menjadi nyata.
10. Penulis juga berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 13 Juni 2016

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05436/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
بَ	Bā'	b	be
تَ	Tā'	t	te
سَ	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
جَ	Jīm	j	je
هَ	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خَ	Khā'	kh	ka dan ha
دَ	Dāl	d	de
ذَ	Żāl	ż	zet (dengan titik di atas)
رَ	Rā'	r	er
زَ	Zai	z	zet
سِ	Sīn	s	es
شِ	Syīn	sy	es dan ye

ص	Sād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ءـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah peng gabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---	Fathah	ditulis	<i>A</i>
----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَلْ	Fathah	ditulis	<i>fa 'ala</i>
ذَكِيرَةٌ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ 2. fathah + ya' mati تَنْسِيَةٌ 3. Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ 4. Dammah + wawu mati فَروْضٌ	ditulis	<i>Ā</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furuḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بِنْكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قُولْ	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'anatum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشَكْرَتْمُ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Bergulirnya wacana tentang relasi agama dan negara, seolah tiada habisnya. Perbincangan tersebut, senantiasa aktual dan faktual seiring dengan berlakunya konsepsi ajaran agama Islam yang multi interpretasi. Oleh karena itu, meskipun sudah banyak uraian yang diberikan tentang konsepsi relasi agama dan negara, upaya untuk mencari format yang memungkinkan akan selalu layak untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Termasuk pandangan tokoh agama seperti Muhammad Natsir dan negarawan seperti Munawir Sjadjzali, pandangan dua tokoh itu layak dikaji mengingat keduannya adalah sama-sama tokoh besar yang pemikiranya telah banyak mewarnai khasanah pemikiran keislaman dan kenegaraan.

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *historis filosofis*, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu kepercayaan, pemikiran, ajaran serta kejadian dengan melihatnya sebagai kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran, dan pemikiran itu muncul, sebagai upaya penegasan yang juga merupakan pengaruh dari hasil interaksi dengan lingkungan dan akar sejarah yang berkembang. Penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan pemikiranya secara sistematis, terkait suatu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang dan sikap yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi sikap Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali tidak terlepas dari pengaruh sosial, pendidikan, organisasi, karir politik dan pemikiran. Sehingga, dapat jelas dilihat pada sisi persamaanya kedua tokoh tersebut sama-sama menerima bahwa dalam Islam tidak mengatur pembentukan sebuah negara dan menerima bahwa kekuasaan ada ditangan rakyat. Dari segi perbedaan Mengenai relasi Islam dan negara, meskipun secara teoritis keduanya sepakat bahwa Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan yang baku, akan tetapi secara praksis aksi politik mereka berbeda. Menurut Muhammad Natsir, Islam dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan (*integratif*), ia beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam yang di dalamnya mengandung ideologi atau falsafah hidup. Sementara menurut Munawir Sjadjzali, antara agama dan negara harus dipisahkan secara jelas fungsi dan wewenangnya (*sekuler*), supaya tidak terjadi pendistorsian. Dan Islam hanya dijadikan sebagai etika sosial saja dalam kehidupan bernegara, bukan sebagai landasan ideologi.

Kata kunci: Islam, Negara, Integratif, Sekuler.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metodologi Penilitian	17
G. Sistematika Pembahaasan.....	20

**BAB II LATAR BELAKANG PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR
DAN MUNAWIR SJADZALI**

**A. Latar Belakang Pemikiran Sosial Keagamaan dan Politik
Muhammad Natsir**

1	Latar belakang sosial keagamaan	23
2	Karir politik	34
3	Karya-karya Muhammad Natsir	36

**B. Latar Belakang Pemikiran Sosial Keagamaan dan Politik
Munawir Sjadjali**

1	Latar belakang social keagamaan	40
2	Karir politik	43
3	Karya-karya Munawir Sjadjali.....	47

**BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMIKIRAN
MUHAMMAD NATSIR DAN MUNAWIR SJADZALI**

A.	Faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Natsir.....	49
B.	Faktor yang mempengaruhi pemikiran Munawir Sjadjali	51

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD NATSIR
DAN MUNAWIR SJADZALI**

A.	Pemikiran Muhammad Natsir tentang relasi Islam dan Negara	53
B.	Pemikiran Munawir Sjadjali tentang relasi Islam dan Negara..	65
C.	Perbedaan dan Persamaan Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali.....	69

1. Persamaan Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali.....	69
2. Perbedaan Pemikiran Muhamad Natsir dan Munawir Sjadjali	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wacana tentang relasi Islam dan Negara selalu menjadi wacana yang tidak habis dimakan zaman, di Indonesia meskipun telah diperdebatkan beberapa tahun yang lalu, dan mengalami pasang surut dalam percaturan politik di Indonesia, akan tetapi wacana ini selalu bertahan pada momen-momen tertentu. Hampir dapat dipastikan ketegangan dan perdebatan ini muncul menjelang pemilu karena momen ini merupakan kesempatan besar bagi semua golongan yang ingin memperjuangkan aspirasi politiknya, baik itu yang berideologikan nasionalis, maupun Islam.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, agama dan negara adalah dua institusi yang sama-sama kuat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Ajaran yang menyatakan, “berilah raja apa yang menjadi haknya dan berilah gereja apa yang menjadi haknya” bisa dipahami sebagai fakta kuatnya pengaruh kedua institusi tersebut.¹

Perbedaan pandangan tentang hubungan agama (Islam) dan Negara,² khususnya setelah momentum kemerdekaan ketika pembentukan konstitusi negara Indonesia, secara nyata dapat dilihat ketika terjadi suatu polemik-polemik pada awal 1940-an, polemik itu telah menyentuh

¹Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai, Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta, LkiS:2007) hlm.21

³ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*, cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 144.

masalah yang lebih penting, yakni hubungan politik antara agama dan negara. Dalam periode ini, tidak berlebihan jika dikatakan tokoh yang sering terlibat adalah Soekarno dan Natsir.

Kaitanya dengan itu bahkan muncul istilah, nasionalisme di Indonesia dimulai dengan nasionalisme muslim, dan karena itu dapat dikatakan bahwa Islam identik dengan nasionalitas.³ Sejalan dengan pandangan ini cukup logis apabila Islam dan Indonesia terdapat banyak keterkaitan termasuk pada peristiwa perumusan Pancasila itu sendiri.

Sejalan dengan argumen di atas, sejak Pancasila dijadikan dasar ideologi formal Republik Indonesia pada tahun 1945 oleh Soekarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh Politikus dan Agamawan, khususnya Islam.⁴ Pada tahun 1978-1985 telah terjadi ideologisasi Pancasila yang diinstruksikan oleh Soeharto, dan kemudian menimbulkan perdebatan yang luar biasa di kalangan tokoh dan gerakan ideologi Islam. Insiden politik semacam itu sempat terulang kembali pada tahun 1990 di negeri ini, yakni mengenai perdebatan ideologi. Sebenarnya sumber perdebatan itu adalah karena masih belum adanya konsensus mengenai relasi Islam dan negara,⁵ khususnya mengenai sistem negara apa yang akan dipakai untuk membangun Indonesia, apakah berasaskan Islam atau sekuler.

Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman apalagi kalau dikaitkan

³ Faishal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana Ketegangan Islam Kreatif dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara wacana.1999), hlm. 50.

4.Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm. 2.

⁵ Douglas E. Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia*, hlm.19.

dengan masalah pembangunan, yang pada dirinya mengandung kepentingan tersendiri pula. Dengan demikian, terdapat bahaya sangat besar berupa keinginan untuk menimbulkan minat belaka dalam membicarakan topik tersebut, tanpa dapat dikemukakan sesuatu yang fundamental untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Apalagi kalau pendekatan yang diambil hanya untuk mencari kaitan dipermukaan belaka antara agama dan ideologi negara.⁶

Fakta bahwa negara Indonesia memiliki beragam budaya, Agama dan suku. Abdurrahman Wahid berpendapat, dalam karakteristik masyarakat heterogen terdapat kategorisasi yang dapat dinisbatkan pada kelompok-kelompok atau etnis tertentu.

Pertama, *accommodationist*, yakni kelompok yang etnis yang bisa bekerjasama dengan kelompok-kelompok etnis lainnya dalam upaya menemukan formulasi *nation-building* yang tepat bagi kelangsungan hidup mereka sebagai negara-bangsa. Kelompok ini mengembangkan toleransi, baik dalam rangka membangun bangsa maupun menata dan memfungsikan negara dalam arti yang sebenarnya. Kedua, *reservationist*, yaitu kelompok masyarakat yang ingin mempertahankan status quo. Ketiga, yakni kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan radikal guna untuk memperbaiki keadaan dalam suatu negara. Keempat, *rejectionist*, yakni kelompok etnis yang merasa tidak bisa bergabung dengan kelompok etnis lainnya. Kelompok

⁶ Abdurrahman Wahid “*Prisma Pemikiran Gus Dur*” (Yogyakarta: LkiS:2010), hlm.1

ini selalu menuntut pembentukan negara-bangsa tersendiri atau pemisahan negara berdasarkan sentimen etnis yang dimilikinya.⁷

Sementara untuk memahami fenomena Islam era modern ini tampaknya akan lebih terbantu bila Islam dilihat sebagai sistem nilai dan ajaran maupun sebagai realitas sosial.⁸ Sebagai sistem nilai dan ajaran, ia bersifat ilmiah dan karenanya sekaligus transenden. Sebagai realitas sosial, Islam adalah fenomena peradaban sekaligus kultur dalam kehidupan manusia. Islam dan realitas sosial tidak hanya sejumlah doktrin yang bersifat universal dan kontekstual, namun juga mengejawantahkan dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika ruang dan waktu.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa konteks Islam tidak cukup dikaji dari ruang spiritual keagamaan, melainkan Islam dapat dipahami dalam berbagai kontek termasuk dalam kontek sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi dan bahkan Islam mencakup konteks politik.

Penelitian ini mengambil judul “Islam dan Negara: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali”. Penyusun lebih memfokuskan pada dua tokoh ini yang tentunya telah banyak mewarnai wacana perdebatan Islam dan Negara sepanjang lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia sampai saat ini.

⁷ Ali Maschan Moesa “*Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Keagamaan*” (Yogyakarta: LkiS:2007), hlm.35.

⁸ Azyumardi Azra “*Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernism, hingga Post-modernisme*”(Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina, 1996) bagian pertama

Kedua tokoh ini menarik untuk dikaji. Pertama, secara umum keduanya masuk dalam kategori aliran yang sama yaitu integratif modernis tetapi beda pendapat mengenai relasi Islam dan negara, khususnya azas negara, apalagi kelompok (background) yang diwakilinya sangat kontradiktif dengan gagasan dan prilaku politik tokoh tersebut, sedangkan Muhammad Natsir yang dibesarkan dalam lingkungan modernis justru lebih akrab dengan pemikiran politik Islam fundamentalis seperti al-Maududi yang sangat menginginkan Islam dijadikan sebuah dasar negara karena menurut Muhammad Natsir sendiri meniru sistem pemerintahan Barat adalah tindakan sekuler yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.⁹

Muhammad Natsir menawarkan Islam sebagai azas negara bukanlah aksi pembangkangan negara (makar), akan tetapi lebih pada penghidupan demokrasi. Oleh sebab itu dalam pidatonya pada sidang pleno konstituante (12 November 1957) ia menghendaki negara Indonesia ini berazaskan ideologi Islam. “Negara demokrasi berdasarkan Islam”.¹⁰ Keinginannya ini bukan semata-mata karena Islam agama mayoritas di Indonesia melainkan ajaran Islam mengenai ketatanegaraan serta kehidupan bermasyarakat itu mempunyai sifat yang sempurna dalam menjamin kerukunan beragama dan bernegara.¹¹

Dalam memandang Islam dan negara, masalah ketatanegaraan merupakan hal yang tak bisa ditinggalkan, sebab faktor inilah yang kemudian seringkali memunculkan perdebatan antara kelompok muslim idealis dan

⁹ Muhammad Natsir , *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 200.

¹⁰ Muhammad Natsir , *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*, hlm. 200.

¹¹ Muhammad Natsir , *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*,hlm. 203.

realis di negara kita. Adanya “Sistem Kekhalifahan” di masa Rasulullah S.A.W. dan sahabat membuat sebagian masyarakat muslim dunia semakin menyakini bahwa jauh sebelum sistem demokrasi muncul, sebenarnya Islam telah mempunyai sistem Tata Negara sendiri.

Sesuai perspektif *Ahl as-Sunnah wa al-Jama‘ah* pemerintahan dinilai dari segi fungsionalnya bukan pada formalitas bentuknya, apakah negara Islam atau bukan. Di samping itu, menurut Munawir Sjadzali Islam tidak mempunyai konsep pemerintahan yang definitif, misalnya tentang suksesi kepemimpinan terkadang memakai *istikhlas*, *bay‘ah*, dan *ahl al-Halli wa al-Aqdi* (sistem formatur). Hal ini menunjukkan Islam inkonsisten dan tidak mempunyai konsep yang baku.¹²

Pentingnya kajian ini terhadap studi Agama adalah, menemukan akar sejarah Agama relasinya dengan negara di Indonesia, serta memperluas wawasan keagamaan kaitanya dengan negara, karena kita tahu agama tidak berdiri sendiri dalam sejarah kehidupan umat manusia. Termasuk pemilihan kedua tokoh yang akan dibahas dalam penelitian ini, karena peneliti merasa betapa pentingnya peran kedua tokoh dengan sumbangan pemikiran dan kiprahnya dalam memajukan keilmuan agama dan kemajuan negara.

Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali adalah dua tokoh agama yang peranan dan pemikirannya banyak mewarnai khasanah pemikiran keagamaan dan kenegaraan di Indonesia, karena sadar dengan betapa pentingnya pemikiran beliau sehingga begitu banyak para peneliti yang terus berusaha

¹² Dedy Djamaruddin Malik dan Idy Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, hlm.169.

menelaah dan meneliti pemikiran beliau namun tidak ada peneliti yang mengkaji perbandingan pemikiran beliau. Dengan alasan itulah penyusun berusaha meneliti pemikiran dua tokoh tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dipaparkan bahwa ada persamaan dan perbedaan pemikiran di antara Muhammad Natsir dengan Munawir Sjadjali mengenai hubungan Islam dan negara, keduanya sama-sama menjunjung nilai demokrasi tetapi berbeda dalam gagasan dan prilaku politiknya. Hal ini bisa disebabkan latar belakang sosiohistoris yang berbeda. Oleh sebab itu perlu penyusun tegaskan bahwa fokus dari permasalahan ini yaitu:

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali dalam memandang relasi Islam dan Negara?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali mengenai relasi Islam dan Negara?

Dua pokok masalah di atas diharapkan dapat mewakili dari beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Di samping itu juga berguna untuk memperjelas arah penelitian yang dimaksud.

C. Tujuan dan Manfaat

Dalam setiap penelitian, pasti mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Rumusan masalah di atas dapat menjadi acuan untuk

menetapkan maksud dan tujuan penelitian sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

- a. Ingin mendalami secara luas perbandingan pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali tentang Islam dan Negara.
- b. Mengungkap secara obyektif perbandingan pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali
- c. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti dan diharapkan mampu memberi motivasi kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memperdalaminya agar mendapat hasil yang maksimal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memahami gagasan-gagasan Pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali
- b. Untuk memenuhi persyaratan akhir mendapat gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Program Studi Perbandingan Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- c. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan tentang pemikiran keislaman dan kenegaraan.

D. Telaah Pustaka

Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali adalah tokoh pemikir dan sekaligus seorang politikus yang sangat dikenal oleh masyarakat luas, meskipun keduanya hidup pada masa yang berlainan, namun gagasannya selalu segar bahkan sering dijadikan rujukan dalam momen-momen akademik.

Penelitian ini mempunyai dua variabel. Pertama, mengenai diskursus Relasi Islam dan Negara. Kedua, mengenai pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali tentang Relasi Islam dan Negara di Indonesia. Banyak buku atau karya ilmiah yang membahas Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali baik itu biografi, perilaku politik maupun gagasannya. Akan tetapi pembahasan itu sering kali tidak dilakukan secara bersamaan hanya difokuskan pada satu tokoh saja kalau memang ada yang mengkaji perbandingan itu juga tidak membahas Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali sekaligus. Karena penulisan ini meliputi dua variabel di atas, maka penyusun merasa perlu menelaah buku-buku yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Sedangkan Ahmad Suhelmi dalam bukunya Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler (1999) juga mengkaji pemikiran kenegaraan dalam perspektif Muhammad Natsir, khususnya pandangan Muhammad Natsir *vis-à-vis* Soekarno. Buku ini lebih melihat sosok pemikir Muhammad Natsir dibanding Natsir yang mewakili tokoh modernisme Islam.

Arifin, dalam skripsi “*Relasi Islam dan Negara: studi atas pemikiran Muhammad syahrur 2005*”. Skripsi ini membahas tentang model relasi Islam dan Negara pada penerapan syariat Islam. Kekurangan dari skripsi ini adalah kurang detailnya mengkaji keterkaitan antara Islam dan negara.

Ahmad Fahkhrudin, dalam skripsi “*Relasi Negara dan agama menurut Dr. Muhammad Imarah 2005*”. Skripsi ini membahas tentang hubungan agama dan negara menurut Imarah serta relevansinya dengan Islam kotemporer.

Samin, dalam skripsi yang berjudul Polemik Agama dan Negara (Studi Komparatif Soekarno vs Muhammad Natsir tentang Ideologi Negara). Skripsi ini mengkaji lebih dalam tentang ideologi negara karena ideologi negara saat ini, Pancasila, dianggap belum memenuhi dasar hukum untuk masyarakat Indonesia. Muhammad Natsir tidak sepakat jika agama dipisahkan dari Negara dan juga Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Dalam skripsi Ahmad Anfasul Marom, Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Muhammad Natsir dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam dan Negara. Ahmad Anfasul Marom berusaha menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut dalam memandang relasi Islam dan Negara dengan menggunakan pendekatan Ushul Fikih yang mana menyinggung kaitannya dengan ideologi negara akan tetapi cakupannya masih secara umum dan terfokus pada kajian politik.

Pemikiran Munawir Sjadzali mengenai negara agama atau negara teokrasi, sebuah negara akan dikatakan negara agama atau teokrasi, apabila

terdapat unsur-unsur tertentu, maka negara tersebut dapat dikatakan negara agama, atau negara teokrasi. Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir dikarenakan negara Indonesia tidak terdapat dari unsur negara agama atau negara teokarasi Pancasila sebagai ideologi negara menurut Munawir merupakan untuk kepentingan umat Islam dan masyarakat secara umum, baik itu dari aspek politik maupun social ekonomi. Ini termuat dalam skripsi Dedy Faisal yang berjudul Islam dan Negara (Negara Pancasila menurut Pemikiran Munawir Sjadjzali).

Dari sekian karya yang membahas Islam dan Negara, baik yang disebutkan penyusun di atas maupun yang ditemukan penyusun, belum ada karya yang membahas secara implisit relasi Islam dan Negara studi komparasi pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali.

E. Kerangka Teori

Perkembangan agama Islam memang sudah menjadi bagian integral dari sejarah Indonesia. Perdebatan hubungan antara agama dan kekuasaan menjadi wacana yang menarik dikalangan pemerhati agama maupun akademisi. Jika agama diperlakukan sebagai alat yang konstruktif, maka dengan sendirinya agama dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengontrol segala kebijakan yang dilakukan penguasa. Bahkan pada masa kolonial, agama dijadikan sebagai sarana dalam mengusung “Ideologi Jihad” untuk melawan ekspansi penjajah, meskipun pada mulanya hanya bersifat sosio-kultural.

Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji masalah Islam dan negara maka penyusun mengkategorikannya dalam perspektif Fiqih As-Siyyasyah atau Siyyasyah As-Syar‘iyyah. Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi Siyyasyah As-Syar‘iyyah ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaran. Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada Maslahah al-Mursalah (kepentingan umum).

Pada awalnya politik menjadi tulang punggung sejarah. Oleh karena itu buku-buku teks sejarah yang berisi tentang kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antar kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Dominasi politik dalam penulisan sejarah menjadi kewajaran untuk waktu yang lama.¹³

Setidaknya kepentingan esensial yang diperlukan di atas sejalan dengan dirumuskannya lima tujuan syari’ah meskipun tidak termuat secara menyeluruh, lima tujuan tersebut yaitu: memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta dan kehormatan.¹⁴

¹³ Kuntowijoyo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 174.

¹⁴ Muhammad Ismail Syah dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 67.

Objek kajian fiqh siyasah atau Siyasyah as-Syari‘yyah menurut Abdul Wahab Khallaf adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan dasar ajaran agama yang bertujuan merealisasikan kemaslahatan manusia untuk kebutuhan mereka.¹⁵ Dengan demikian secara garis besar bahasan Fiqih as-Siyasyah meliputi tiga aspek utama di antaranya: 1) Peraturan dan Perundang-Undangan Negara sebagai pedoman dan landasaan idil dalam mewujudkan kemaslahatan umat. 2) Pengorganisasian untuk mewujudkan kemaslahatan. 3) Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai negara.¹⁶

Pada penggunaan teori berikutnya, untuk membidik model relasi Agama dan Negara lebih jauh, pada kontek penelitian ini penyusun juga meminjam teori dari Abdullahi Ahmad An-Naim, dengan model paradigma barunya Abdullahi Ahmad An-Naim, beliau berpendapat bahwa Syari’ah tidak cukup hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus dengan dekonstruksi. Karena Islam lahir dalam setting masyarakat yang sama sekali berbeda dengan masyarakat kontemporer yang tengah berlangsung dalam kehidupan modern saat ini.

Sebagai seorang cendikiawan Muslim, Abdullahi Ahmad An-Naim tentu saja memiliki titik tolak pemikiran. Pertanyaanya, apakah Islam sebenarnya

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat al-Syari‘at*, (AL-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 4.

¹⁶ J Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 28.

sesuai atau tidak sesuai dengan sistem politik modern, di mana ide tentang negara-bangsa (*enation state*) merupakan salah satu unsur utamanya. Pertanyaan ini dicetuskan dari suatu keyakinan Abdullahi Ahmad An-Naim bahwa negara-bangsa merupakan suatu kenyataan (bentuk negara modern) yang harus diterima oleh umat Islam.¹⁷

Penekanan Abdullahi Ahmad An-Naim terhadap institusi negara dan agama dalam sejarah masyarakat Islam bukan berarti bahwa pengalaman masa lalu masyarakat tersebut harus menjadi model bagi masyarakat Islam saat ini dan masa depan. Ada perbedaan yang jelas antara institusi negara dan agama dalam masyarakat Islam. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa tidak ada satu model institusi dan negara yang baku dalam masyarakat Islam, yang ada adalah sejumlah model yang saling bersaing. Bahkan, dalam setiap model terdapat ketidak jelasan mengenai bagaimana distribusi otoritas, fungsi, dan hubungan institusi-institusi tersebut. Meyakini dan mengaktualisasikan suatu cara pandang syariah merupakan hak setiap individu. Artinya, setiap individu memiliki kebebasan yang sama soal ini.¹⁸ Sama bebasnya dengan pengikut agama lain dalam mengapresiasi keyakinan agamanya masing-masing. Jika demikian, menjadi tidak mungkin bila agama (sabda Tuhan yang diyakini kebenarannya) lantas menjadi konstitusi sebagaimana hukum positif. Yang terjadi pasti konflik dan perebutan otoritas. Atas dasar inilah Abdullahi Ahmad An-Naim menolak atas meresistensi setiap kekuatan yang mencoba

¹⁷ Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*,(Bandung: Mizan, 2007),hlm. 57

¹⁸ Abdullahi Ahmad An-Naim, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*,hlm.57.

memaksakan syariah sebagai konstitusi Negara dengan tanpa mengakomodir pihak-pihak lain yang senegara namun memiliki cara pandang dan konsep yang berbeda soal syariah.

Terakhir adalah dialektika dalam pembentukan negara dan pemilihan pemimpinnya. Pada titik ini, yang paling ideal, paling adil, dan paling meminimalisir konflik antar kelompok beragama, Abdullahi Ahmad An-Naim mengajukan konsep negara modern sebagai pilihan yang tepat.¹⁹ Negara modern yang dimasud merupakan Negara yang menerapkan hukum positif sebagai konstitusinya.

Negara modern dengan hukum positif dipilih Abdullahi Ahmad An-Naim sebab konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada symbol dan identitas agama apapun. Hukum positif merupakan hasil dari konstruksi yang bermuara pada rasionalitas dan tuntutan yang bersifat empiris. Dalam hukum positif pula, setiap kelompok memiliki jatah kebebasan yang setara.

Umat Islam kontemporer harus memiliki corak yang khas yang selaras dengan konteksnya. Gagasan ini akan tampak jelas sekali jika ditarik pada konteks negara. Mungkin banyak dari generasi Islam masa lalu mampu menerapkan hukum klasik sebagai konstitusi negara, namun hal yang sama sangat risikan jika diulangi pada saat sekarang ini. Sebab kompleksitas masyarakat saat ini sangat jauh bila dibandingkan dengan masa lalu. Jika dipaksakan, yang tersisa hanyalah konflik horisontal.

¹⁹ John O. Voll, “Foreword”, dalam Abdullahi Ahmad An-Na’im, Toward, hlm. ix-x. Bandingkan dengan An-Na’im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, hlm. 162

Negara modern dengan hukum positif dipilih An-Na'im sebab konstitusinya paling netral dari keberpihakan pada simbol dan identitas agama apapun. Hukum positif merupakan hasil dari konstruksi yang bermuara pada rasionalitas dan tuntutan yang bersifat empiris. Dalam hukum positif pula, setiap kelompok memiliki jatah kebebasan yang setara. Penetapan negara ideal dalam bentuknya yang modern dengan hukum positif sebagai konstitusinya dilatarbelakangi oleh pandangan Abdullahi Ahmad An-Naim bahwa negara, sejatinya, merupakan murni persoalan teritorial, bukan persoalan agama. Mengurus teritorial diperlukan sebuah telaah yang bersifat proporsional dan kontekstual. Apalagi yang menyangkut hak setiap penghuni yang menetap diteritori tersebut.

Abdullahi Ahmad An-Naim mengajukan sebuah pandangan bahwa semestinya setiap konstitusi negara dibuat berdasarkan apa yang disebut nalar publik (public reason).²⁰ Pengertian publik kaitanya dengan konteks ini tidak sebatas pada salah satu kelompok dominan, melainkan seluruh entitas kelompok yang ada dalam teritorial tanpa diskriminasi.

F. Metodologi Penelitian

Agar penelitian dan pembahasan ini lebih terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dan dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu, adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

²⁰ Abdullahi Ahmad An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, hlm.147.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bersifat empiris yang bersumber dari temuan-temuan penelitian terdahulu.²¹ Jadi penelitian ini menekankan sumber informasinya dari buku-buku seputar Islam dan Negara, sesuai kerangka pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek kajian.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek darimana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan dua sumber data: *pertama* sumber data primer dalam penggunaan data primer penyusun menggunakan buku-buku yang ditulis langsung oleh kedua tokoh yang diteliti, seperti karya Munawwir Sjadjzali yang berjudul “Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran” 1993 dan karya Muhammad Natsir seperti “Agama dan Negara dalam Perspektif Islam” 2001. *Kedua*, sumber data sekunder, data sekunder adalah data pelengkap yaitu karya-karya yang membahas objek yang sama.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif dukumen pada umumnya digunakan sebagai sumber sekunder, tetapi dalam penelitian tertentu, didalamnya dukumen merupakan satu-satunya naskah, sehingga dianggap

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2008), hlm. 10.

sebagai sumber data utama, maka dukumen menduduki posisi sebagai sumber utama.²²Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar dan elektronik.²³ Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah telaah pada teks-teks yang menerangkan objek.

b. Teknik pengolahan data

Analisis data merupakan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian, hingga ditemukan pengertian yang relevan dengan fokus penelitian.²⁴

Jadi dalam penelitian ini penulis mengambil buku, jurnal atau literatur yang lain tentang pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali terkait relasi Islam dan Negara. Selanjutnya barulah menganalisis perbedaan dan persamaan pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Historis-filosofis, metode penelitian sejarah atau disebut metode historis. Metode penelitian sejarah adalah suatu langkah atau cara untuk merekonstruksi masa lampau

²² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010). hlm. 235.

²³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*,hlm. 21-22.

²⁴ Amin Abdullah dkk. *Metodologi Penelitian Agama “Pendekatan Multidisipliner”* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Suka. 2006), hlm. 224.

secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengkritik, menafsirkan, dan mensintesiskan data dalam rangka menegakkan fakta serta kesimpulan yang kuat,²⁵ sedangkan pendekatan filosofis mengkaji tentang cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakekat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Metode Historis filosofis adalah suatu pemahaman terhadap suatu kepercayaan ajaran, kejadian dengan melihatnya sebagai kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan dimana kepercayaan dan ajaran itu muncul . Jadi pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yang berusaha memahami sejarah relasi Islam dan Negara dengan merujuk pada pemikiran tokoh, dan pokok-pokok nilai objek penyajian data dalam penelitian ini pun bersifat historis-filosofis.

Tentunya, pendekatan ini dipilih guna mendapatkan jawaban-jawaban yang objektif sesuai dengan prinsip penelitian. Dan berkaitan dengan tema yang diangkat, penulis mencoba untuk menelaah relasi Agama dan pemikiran tokoh Agama sesuai metode yang dipilih.

²⁵ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 55.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan ini penyusun membagi menjadi lima bab:

Bab pertama memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan biografi pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali. Penelaahan ini meliputi latar belakang sosial, keagamaan dna perilaku politik kedua tokoh tersebut dalam menggagas relasi Islam dan negara di Indonesia. Bab ini juga menyinggung sedikit cita-cita ideologi negara yang mereka perjuangkan sebagai representasi tokoh muslim yang peduli terhadap bangsa, di antaranya yang berkaitan dengan Islam dan Negara.

Bab ketiga melacak faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran politik Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali terkait relasi Islam dan Negara,

Bab keempat menganalisa pemikiran kedua tokoh tersebut tentang relasi Islam dan Negara, yaitu dengan membandingkan gagasan kedua tokoh di atas, apakah dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dimaksudkan untuk memperlihatkan letak signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan memberikan konklusi pemikiran Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjzali tentang hubungan Islam dan Negara, sedangkan

saran-saran ditujukan bagi para penyusun atau peneliti yang akan mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan variabel skripsi ini lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bisa dipahami bahwa secara historis kondisi sosial politiknya Muhammad Natsir dan Munawir Sjadzali memang berbeda, Akan tetapi secara ideologis perjuangan dan cita-cita politik mereka masih terus mewarnai panggung politik Indonesia hingga saat ini. Hal ini bisa dilihat dari implikasi pemikiran dan cita-cita mereka terhadap pemikiran politik Islam yang sedang berkembang kini. Dan untuk lebih jelasnya, penyusun simpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai relasi Islam dan negara, meskipun secara teoritis keduanya sepakat bahwa Islam tidak mempunyai sistem kenegaraan yang baku, akan tetapi secara praksis aksi politik mereka berbeda. Menurut Muhammad Natsir, Islam dan negara adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan (integratif), ia beranggapan bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan bagian integral Islam yang di dalamnya mengandung ideologi atau falsafah hidup. Sementara menurut Munawir Sjadzali, antara agama dan negara harus dipisahkan secara jelas fungsi wewenangnya (sekular), supaya tidak terjadi pendistorsian. Dan seharusnya Islam hanya dijadikan sebagai etika sosial saja dalam kehidupan bernegara, bukan sebagai landasan ideologi.

2. Secara normatif paradigma Muhammad Natsir mengenai relasi Islam dan negara di atas didasarkan pada salah satu ayat al-Qur'an yang berbunyi:

و مَا لَقِتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (الذاريات : ١)

Sedangkan paradigma Munawir Sjadjzali di dasarkan pada salah satu kaidah Usul Fiqih yang berbunyi:

تصرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرُّوعَيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصلَحِ !

Selain kondisi normatif tersebut, kondisi sosio-historis juga sangat mempengaruhi model pemikiran mereka baik dari setting sosial maupun aktivitas organisasinya. Muhammad Natsir dibesarkan di lingkungan Islam modernis, yang sudah banyak melakukan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam. Sedangkan Munawir Sjadjzali tumbuh besar di lingkungan Islam taat yang memegang teguh doktrin Islam klasik dengan mengontekskan pada tradisi atau budaya setempat. corak pemikiran politik Muhammad Natsir dikategorikan sebagai kelompok idealis dalam wacana politik Islam. Dan sebagai konsekuensinya, pemikiran semacam ini banyak berimplikasi pada tokoh Islam modernis, yang mereformasi doktrin-doktrin lama dengan tetap berlandaskan al-Qur'an, akan tetapi tetap menolak keras paham sekular. Sedangkan pemikiran politik Munawir Sjadjzali dikategorikan sebagai kelompok realis, yang cenderung moderat dalam merespon realitas sosial., pemikiran Munawir Sjadjzali cukup mewarnai di kalangan Islam neo-modernis, sebuah kelompok yang afirmatif dalam merespon sekulerisme, dan secara tegas menolak formalisasi agama.

B. Saran-saran.

Relasi Islam dan negara selalu mengalami ketegangan, dalam kehidupan politik Indonesia, apalagi menjelang Pemilu baik di era orde lama ataupun orde baru. Akan tetapi ketegangan itu telah mengalami perubahan di era reformasi ini, karena aspirasi politik Islam sudah tidak dipasung lagi dalam berpolitik praktis seperti mendirikan partai Islam.

Penelitian ini hanyalah salah satu cara bagaimana menyikapi relasi Islam dan negara di Indonesia. Dan lebih menitik beratkan pada perbedaan cita-cita ideologi negara yang kemudian penyusun hadapkan pada dua tokoh, Muhammad Natsir dan Munawir Sjadjali. Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh penyusun selanjutnya mengingat baru sebagian masalah yang saat ini penyusun kaji dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Di antaranya mengenai demokrasi, sistem tata negara Islam di Indonesia dan pandangan mereka terhadap pemberlakuan Syari‘at Islam.

Berkaitan dengan skripsi ini penyusun mengharapkan saran dan kritik para pembaca guna memperbaiki kesalahan atau kekurangan yang ada. Selain itu penyusun sendiri sadar bahwa karya ini merupakan buah pertama dari proses panjang pendewasaan keilmuan penyusun, sehingga masih sangat dimungkinkan jauh dari kesempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Wahab Khalaf, “*Ilm Us al-Fiqh*” cet. ke-11 Kairo: Dar al-Qalam, 1977
- Abdul Majid, “*PPII MAKALAH*” dalam <http://www.academia.edu>
- Abdullah, Amin, dkk. *Metodologi Penelitian Agama “Pendekatan Multidisipliner”*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Suka, 2006.
- Abdullah,Amin “*Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*” Bandung: Mizan, 2000
- Abdurrahman, Dudung. “*Metode Penelitian Sejarah*” Jakarta: Logos, 1999
- Ahmad, An-Na’im Abdullahi, “*Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*”, Bandung: Mizan, 2007.
- Al-maududi Abu al-A’la , “*Political Theory of Islam*” dalam Khursyid Ahmad, *Islamic Law and Constitution*, Lahore: 1967
- Arifin, “*Relasi Islam dan Negara: studi atas pemikiran Muhammad syahrur 2005*”. Skripsi UIN SUNAN KALIJAGA
- Azra Azyumardi dan Saiful Umam (ed.). “*Tokoh dan Pimpinan Agama: Biografi Sosial-Intelektual*” Jakarta: Badan Litbang Agama Depag RI dan PPIM, 1998
- Azra, Azumardi (Ed.), “*Menteri-menteri Agama RI; Biografi Sosial-Politik*” Jakarta: Kerjasama INIS, PPIM dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998
- Azra, Azyumardi. “*Pergolakan politik Islam, dari fundamentalisme, modernism, hingga post-modernism*” Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina, 1996.
- Bashari, dkk. “*Sejarah Tokoh Bangsa*” Yogyakarta: Pustaka Dedy Djamaruddin Malik dan Idy Subandy Ibrahim. “*Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholis Madjid, dan Jalaluddin Rakhat*” Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Douglas, E. Ramage. “*Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi, alih bahasa Hartono Hadikusumo*” Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Efendy Bahtiar, “*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*” Jakarta: Paramadina, 1998

- Efendy,Bahtiar (RE) “*Politisasi Islam, Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*”,Bandung,:Mizan, 2000
- Fachri Ali dan Bahtiar Effendi, *Merambah jalan Baru Islam, Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*” Bandung,:Mizan, 1990
- Fahkhrudin, Ahmad “*Relasi Negara dan agama menurut Dr. Muhammad Imarah 2005*”
- Faisal, Dedy “*Islam dan Negara (Negara Pancasila menurut Pemikiran Munawir Sjadjali)*”
- Feillard, Andree “*NU Vis-à-Vis Negara: Pencarian isi, Bentuk dan Makna*” Yogyakarta: LKiS, 1999
- Fidersfield, Howard “*Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentith Century Indonesia*” Ithacha: Cornell University Press, 1970
- Fillard, Andree dkk..“*Munawir Sjadjali NU dan Masyarakat Sipil*” Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ghofur, Abdul. “*Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia*” cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hakim Abd al-Hamid, “*As-Sulam,*” Jakarta: Sa’adiyah Putra, t.t
- Harjono Anwar dkk, *Pemikiran dan Perjuangan Mohammad Natsir*, cet. ke-3 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Ismail Muhammad Syah dkk..”*Filsafat Hukum Islam*” Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ismail, Faishal.“*ideologi hegemoni dan otoritas agama, wacana ketegangan Islam Kreatif dan Pancasila*”. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- J. Suyuthi Pulungan. “*Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- J.H. Rapar, “*Filsafat Politik*” Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2001
- Kuntowijoyo. “*Metode Penelitian*” Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Latif Yudi “*Intelelegensi Muslim dan Kuasa*” Bandung:Mizan,2005
- M. Wahyuni Nafis (Ed.), Munawir Sjadjali, *Dari Lembah Kemsikinan, dalam buku: Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadjali, MA.,* Jakarta: Paramadina, 1995

Maarif Ahmad Syafi'i, "Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante" cet. ke-3 Jakarta:LP3ES, 1996

Mahendra Yusril Ihza "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Natsir" Jurnal ISLAMIKA, no 13, (1994)

Mahendra, Yusril Ihza "Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia dan Partai Jama'at I-islami (Pakistan)," Jakarta: Paramadina, 1999

Mahendra, Yusril Ihza "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik M. Natsir," Jurnal Islamika, No. 3,1994

Marom, Ahmad Anfasul "Diskursus Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Muhammad Natsir Dan Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Islam Dan Negara"

Masdar Umaruddin "Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokras", Yogyakarta,:Pustaka Pelajar, 1999

Masykuri, Abdillah. "Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993" Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Minhaji, Ahmad " Ahmad Hassan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958" Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2001

Mochtar, Kustiniyati (peny), "Diplomasi: Ujung Tombak" Perjuangan RI, Jakarta: Gramedia, 1989

Moesa, Maschan Ali. "Nasionalisme Kiai, konstruksi Sosial Berbasis Agama" Yogyakarta: LkiS, 2007.

Mun'im A. Sirry, "Sejarah Fiqih Islam; Sebuah Pengantar" cet. ke-2 Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Nana, Syaodih Sukmadinata. "Metode Penelitian Pendidikan" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Nasution S "Sejarah Pendidikan Indonesia" Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Natsir Muhammad, "Capita Selecta" cet. ke-3 Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Natsir, Muhammad. "Agama dan Negara dalam Perspektif Islam" cet. ke-1 Jakarta: Media Dakwah, 2001.

Noer Deliar, "Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942" Jakarta: LP3ES, 1982

Noer, Deliar, “*Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*” cet. ke-2 Bandung: Mizan, 2000

Nurcholish Madjid, Prof. Dr.Munawir Sjadjali, Antara Diplomasi dan Tugas Kiai, dalam buku: *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr.Munawir Sjadjali, MA.*, M. Wahyuni Nafis (Ed.)

Nyoman, Kutha Ratna. “*Metodologi Penelitian*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rosidi, Ajib, “*M. Natsir, Sebuah Biografi*” Jakarta: Girimurti Pustaka, 1990

Samin, “*Polemik Agama dan Negara (Studi Komparatif Soekarno vs Muhammad Natsir tentang Ideologi Negara)*”

Sjadjali Munawir ,”*Negara Pancasila Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler*” ceramah pada Pekan Orientasi Manggala BP7 12 Juni 1990

Sjadjali, Munawwir. “*Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” edisi ke-5 Jakarta: UI Press, 1993.

Sudaryanto.”*filsafat politik Pancasila*” Yogyakarta: Kepel press, 2007.

Suhaimi, “Munawir Sjadjali dan International Studies Menembus Kebekuan Pendidikan Islam” <http://www.averroes.or.id>

Suhelmi, Ahmad “*Soekarno Versus Natsir: Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*” Tokoh Bangsa,2005

Supardi “*Konsep Negara Menurut Mohammad Natsir Dan Upaya Mewujudkannya Di Indonesia (1928 – 1959)*” Skripsi Fakultas Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang.2006

Tanzeh, Ahmad. “*Pengantar Metode Penelitian*” Yogyakarta : Teras, 2009.

Thohir Luth, *M. Natsir: Dakwah dan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999

Wahab Khallaf, Abdul. “*Al-Siyasat al-Syari’at*” AL-Qahirat: Dar al-Anshar, 1977.

Wahid, Abdurrahman. “*Prisma Pemikiran Gus Dur*” Yogyakarta: LkiS, 2010.

Yunus, Mahmud, “*Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*” Jakarta: Hidayat Agung, 1982

CURRICULUM VITAE

Data diri

Nama : Syamsul Huda
Tanggal Lahir : 08 Agustus 1987
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Asal : Dusun Mejeruk, Desa Bulurejo, Kec. Rengel, Kab. Tuban - Jawa Timur
No. HP : 085225240909
Email : samsul09520032@gmail.com
Status : Belum menikah



Pendidikan Formal

1993-1999 SDN 03 Bulurejo
1999-2002 MTS Syi'ar Islam Maibit
2004-2007 MA As-Shomadiyah Tuban
2007-2008 Universitas Ronggolawe Tuban Fakultas Ilmu Sosial Politik Jurusan Ilmu Politik (Tidak Selesai)
2008-2009 Universitas Sunan Bonang Tuban Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum (Tidak Selesai)
2009-2016 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama Program Studi S1

Pendidikan Nonformal

2002-2007 PP An-Nidzomiyah Tuban-Jawa Timur
2007-2009 pp Ash-Shomadiyah Makam Agung Tuban-Jawa Timur

Pengalaman Organisasi

2006 Ketua OSIS MA As-Shomadiyah Tuban
2006 Koordinator Forum komunikasi OSIS Tuban
2008 Pengurus Komisariat PMII Unirow Tuban
2011 Pengurus PMII Rayon Pembebasan Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Su-Ka
2012 Pengurus Komisariat PMII UIN Su-Ka